

**IMPLEMENTASI PROGRAM DANA PEMBANGUNAN WILAYAH KELURAHAN
(DPWKEL) DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI
KELURAHAN DERINGO KECAMATAN CITANGKIL KOTA CILEGON**

Oleh :

Devi Yanatasia Winanda¹⁾, Yeni Widystuti²⁾, Nikki Prafitri³⁾

6661200038@untirta.ac.id

Prodi Administrasi Publik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa¹²³⁾

ABSTRAK

DPWKEL merupakan program yang dijadikan prioritas oleh Pemerintah Daerah Kota Cilegon dan merupakan kebijakan yang bersifat *bottom-up*. Namun, program DPWKEL ini masih menghadapi berbagai tantangan yang ditandai dengan terbatasnya akses informasi dan partisipasi masyarakat secara menyeluruh, keterbatasan SDM dalam pelaporan serta pembatasan jenis dan lokasi kegiatan juga menjadi kendala yang menghambat jangkauan program. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Implementasi Program Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan (DPWKEL) dalam memenuhi Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Deringo Kecamatan Citangkil Kota Cilegon. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah model implementasi kebijakan Thomas B. Smith dengan empat aspek yaitu *Idealized Policy*, *Target Groups*, *Implementing Organization*, dan *Environmental Factor*. Penelitian ini menggunakan model deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa aspek *Idealized Policy*, *Target Groups*, *Implementing Organization*, dan *Environmental Factor* telah berjalan dengan baik, namun masih menghadapi kendala seperti kurangnya pemahaman masyarakat, dan peran kecamatan sebagai penghubung antar OPD belum optimal. Saran meliputi peningkatan sosialisasi, dan diperlukannya pelatihan dan penguatan peran kecamatan sebagai fasilitator dan penghubung antar OPD. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mencapai keberhasilan program DPWKEL.

Kata kunci : Implementasi, Kebijakan Publik, DPWKEL

ABSTRACT

DPWKEL is a program that is made a priority by the Cilegon City Regional Government and is a bottom-up policy. However, the DPWKEL program still faces various challenges characterized by limited access to information and overall community participation, limited human resources in reporting and restrictions on the type and location of activities that also hinder the reach of the program. This study aims to find out about the Implementation of the Village Regional Development Fund Program (DPWKEL) in meeting Community Welfare in Deringo Village, Citangkil District, Cilegon City. The theory used in this study is Thomas B. Smith's policy implementation model. This study uses a descriptive model with a qualitative approach. The results of this study show that the aspects of Idealized Policy, Target Groups, Implementing Organization, and Environmental Factor have gone well, but still face obstacles such as lack of public understanding, and the role

of sub-districts as a liaison between OPD has not been optimal. Suggestions include increasing socialization, and the need for training and strengthening the role of sub-districts as facilitators and liaisons between OPD. These steps are expected to achieve the success of the DPWKEL program.

Key Words : Implementation; Public Policy; DPWKEL

PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan dan budaya. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pembangunan merupakan suatu proses perubahan kearah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Pembangunan juga pada hakekatnya merupakan suatu rangkaian upaya yang dilakukan secara terus menerus untuk mencapai suatu tingkat kehidupan masyarakat yang sejahtera, Salah satu ketersediaan sarana dan prasarana yang baik membawa dampak yang baik terhadap aktivitas warga atau masyarakat kemudian sebaliknya apabila infrastruktur buruk, maka kemungkinan akan berdampak buruk terhadap masyarakat.

Kelurahan sebagai bagian terkecil dari pemerintahan, memiliki peran penting dalam proses pembangunan, terutama dalam menerapkan program-program yang langsung berkaitan dengan kebutuhan masyarakat. Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan (DPWKEL) merupakan program yang diharapkan dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat di tingkat kelurahan. Dana ini diberikan untuk membiayai berbagai kegiatan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas kelurahan.

Fokus Dana Kelurahan adalah untuk mempercepat pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat Kelurahan dalam memenuhi kesejahteraan masyarakat. Adanya dana kelurahan membuat pemerintah Kota Cilegon terdorong untuk lebih mengembangkan kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada kelurahan untuk masyarakatnya. Hal tersebut terbukti dengan adanya Peraturan Walikota Cilegon (PERWALI) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Dana Pembangunan

Wilayah Kelurahan (DPWKel) yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Cilegon. Peraturan Walikota Cilegon (PERWALI) Nomor 7 Tahun 2021 ini merupakan perubahan kedua atas Peraturan Walikota Cilegon (PERWALI) Nomor 34 Tahun 2015 tentang Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan (DPWKel) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cilegon. Dalam Peraturan Walikota Cilegon (PERWALI) Nomor 7 Tahun 2021 terdapat regulasi terbaru terkait penganggaran sesuai dengan pasal 4 no 2 yang menjelaskan bahwa Alokasi anggaran diberikan kepada setiap RW di seluruh Kelurahan dengan besaran paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Program Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan (DPWKel) merupakan program yang saat ini dijadikan prioritas oleh Pemerintah Daerah Kota Cilegon dan merupakan kebijakan yang bersifat *bottom up*, hal tersebut dikarenakan aktor yang melakukan inisiasi dan berperan langsung dalam kegiatan pembangunan adalah masyarakat di tingkat kelurahan. Dengan tujuan sebagai berikut: 1). Meningkatkan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan, dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat; 2). Mendorong percepatan dan pemerataan pembagunan daerah; 3). Mendorong percepatan penanggulangan kemiskinan daerah. Program ini juga merupakan salah satu kebijakan yang diimplementasikan melalui alokasi anggaran kewilayahan sebesar 5% dari APBD di luar Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan melakukan pembangunan sarana dan prasarana lingkungan pada wilayah kelurahan yang berada di kota Cilegon. program ini didanai 100 Juta per RW dengan harapan dapat menjadikan pembangunan di Kota Cilegon semakin merata di setiap lingkungan. Pembangunan yang dilakukan pada program ini yaitu berupa pembangunan paving blok lingkungan, drainase lingkungan, TPT lingkungan, rutilahu, posyandu/balai warga, jamban keluarga, pos kamling dan gapura RW, rehabilitasi musholla, pagar makam, sumur resapan, taman bermain anak, dan penerangan lingkungan permukiman.

Kota Cilegon memiliki dinamika pembangunan yang menarik untuk dikaji karena merupakan pusat pertumbuhan ekonomi dengan kontribusi besar dari sektor industri dan program Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan (DPWKEL) dibuat oleh pemerintah Kota Cilegon untuk memenuhi kebutuhan pembangunan di tingkat kelurahan, namun di sisi lain, masih ada beberapa daerah yang membutuhkan perhatian lebih di bidang pembangunan, pelayanan publik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini membuat Kota Cilegon, khususnya Kecamatan Citangkil, menjadi perwakilan yang relevan untuk memahami bagaimana program seperti Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan (DPWKEL) dilaksanakan. Salah satu contoh nyata adalah Kelurahan Deringo di Kecamatan Citangkil, yang hingga saat ini masih menghadapi banyak masalah dalam pembangunan. Dibandingkan dengan kelurahan lainnya di Kota Cilegon, Kelurahan Deringo terlihat belum maju karena keterbatasan infrastruktur, kurangnya fasilitas umum, dan kurangnya akses ke program pemberdayaan masyarakat.

Identifikasi masalahnya adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang program DPWKel, keterbatasan sumber daya manusia dalam pelaporan kegiatan, dan keterbatasan kewenangan dalam menentukan jenis dan lokasi kegiatan. Kecamatan Citangkil memiliki jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) penerima bantuan terbanyak di Kota Cilegon, dengan Kelurahan Deringo sebagai kelurahan yang memiliki RTS terbanyak, sehingga penelitian ini dapat memberikan wawasan mendalam tentang dampak program DPWKEL pada masyarakat yang paling membutuhkan.

LITERATURE REVIEW

Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan adalah langkah penting dalam menjalankan aturan-aturan pemerintah. Ini melibatkan proses menerjemahkan keputusan kebijaksanaan menjadi tindakan nyata yang dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk individu, pejabat pemerintah,

dan kelompok swasta. Proses ini tidak hanya rumit, tapi seringkali dipengaruhi oleh faktor politis karena melibatkan berbagai kepentingan. Dalam konteks ini, keberhasilan implementasi kebijakan diukur dari sejauh mana tindakan-tindakan tersebut sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan apakah tujuan akhir dari kebijakan tersebut benar-benar tercapai. Implementasi kebijakan juga dianggap sebagai kunci untuk menyelesaikan masalah-masalah publik, karena kebijakan yang baik hanya akan bermanfaat jika dijalankan secara efektif dalam kehidupan sehari-hari.

Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan (DPWKEL)

Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan yang selanjutnya disingkat DPWKel adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui anggaran Kecamatan pada bagian anggaran kelurahan untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan di lingkungan RW dan pemberdayaan masyarakat.

Kegiatan ini dilakukan melalui swakelola dengan melibatkan Kelompok Masyarakat dan/atau Organisasi Kemasyarakatan yang diatur dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan menyerap tenaga kerja lokal dan tidak memerlukan teknologi tinggi, pekerja dalam hal ini adalah penduduk setempat berusia minimal 18 tahun dan diprioritaskan masyarakat miskin yang berdomisili di Kelurahan setempat.

Penelitian Terdahulu

Berikut merupakan beberapa penelitian terdahulu yang menjadi pijakan penting dalam penelitian ini.

1. Firmansyah dkk. (2020) meneliti pengaruh Dana Desa terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Cibitung, Sukabumi, menggunakan metode campuran. Penelitian ini relevan karena sama-sama membahas Dana Desa, meskipun pendekatannya metodologinya berbeda.

2. Khaerunissa dkk. (2023) mengkaji kapasitas inovasi Program Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan (DPWKel) di Kota Cilegon. Mereka menggunakan metode kualitatif deskriptif dan konsep Radiografi of the Governance Process. Penelitian ini serupa dalam fokus dan metode, namun berbeda dalam teori dan regulasi yang digunakan, serta tujuan analisisnya yang lebih menekankan pada kapasitas inovasi dibanding implementasi program.
3. Tadanugi (2019) meneliti pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan sarana dan prasarana di Desa Bo'e, Kabupaten Poso. Ia menemukan bahwa ADD efektif dalam pembangunan fisik namun tidak berdampak signifikan pada produktivitas. Persamaan terletak pada pendekatan kualitatif dan topik ADD, sedangkan perbedaan mencakup teori yang digunakan.
4. Pramudyansyah dan Kurniawan (2023) membahas implementasi program peningkatan tata guna air irigasi (P3TGAI) di Desa Jatidrojog, Lamongan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan teori yang sama, namun berbeda lokasi dan jenis program yang dianalisis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Implementasi Program Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan (DPWKEL) dalam memenuhi Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Deringo Kecamatan Citangkil Kota Cilegon. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah model implementasi kebijakan Thomas B. Smith dengan empat aspek yaitu *Idealized Policy*, *Target Groups*, *Implementing Organization*, dan *Environmental Factor*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Proses pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penentuan informan dilakukan melalui teknik *purposive* dan *snowball* dengan melibatkan tujuh informan. Informan yang peneliti tetapkan merupakan orang-orang yang peneliti

anggap memiliki informasi yang relevan dalam penelitian ini. Selain itu, analisis data dilakukan dengan menggunakan model interaktif yang dikemukakan oleh Miles & Huberman (2014) dalam (Sirajuddin Saleh, (2017) yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Adapun untuk pengujian keabsahan data pada penelitian ini dilakukan dengan triangulasi dan *member check*.

PEMBAHASAN

Implementasi Program Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan (DPWKEL) Dalam Memenuhi Kesejahteraan Masyarakat Di Kelurahan Deringo Kecamatan Citangkil Kota Cilegon yang dikaji menggunakan model implementasi kebijakan Smith yang memiliki 4 aspek implementasi kebijakan, yaitu *Idealized Policy*, *Target Group*, *Implementing Organization*, dan *Environmental Factor* yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. *Idealized Policy*

Menurut Smith dalam Samudra, dkk (2023:54), kebijakan yang diidealkan (*idealized policy*) adalah pola-pola interaksi ideal yang telah mereka definisikan dalam kebijakan yang berusaha untuk diinduksikan. Kebijakan ini menggambarkan bagaimana proses implementasi seharusnya berjalan, termasuk peran para aktor, mekanisme pelaksanaan, dan hasil yang diharapkan. Dengan kata lain, yaitu kebijakan yang diidealkan merupakan gambaran ideal dari kebijakan publik yang diharapkan oleh perumusnya. Dalam aspek ini diharapkan dapat memberikan jawaban apakah perumus kebijakan telah mampu mengidealisasikan suatu kebijakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan (DPWKEL) memiliki pedoman teknis (Juknis) yang jelas dan mudah dipahami serta didukung oleh sosialisasi yang dilakukan sebanyak empat kali dan regulasi formal seperti Perwali Kota Cilegon No. 7 Tahun 2021 tentang Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan SK Camat tentang Penetapan Kelompok Masyarakat (POKMAS) Kelurahan Tahun

Anggaran 2022-2024. Meskipun petunjuk pelaksana dan teknis mudah dipahami oleh pengurus RT/RW dan Pokmas, masih terdapat kesenjangan pemahaman di tingkat masyarakat umum terkait detail dan tujuan program. Dari sisi relevansi, Program Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan (DPWKEL) sangat sesuai dan efektif dalam menjawab kebutuhan masyarakat melalui pendekatan partisipatif, khususnya pembangunan sarana dan prasarana di wilayah Kelurahan Deringo, dan meskipun terkendala keterbatasan lahan dan kepemilikan oleh pihak ketiga seperti Krakatau Steel, program ini tetap efektif dan bahkan menjadi model bagi daerah lain.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Siti Khaerunnisa, dkk (2023:646) menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Cilegon sudah mengalokasikan anggaran 5% dari APBD setelah dikurangi DAK melalui DPWK melalui anggaran kecamatan pada bagian anggaran kelurahan untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan Masyarakat. Hal tersebut telah diatur melalui Peraturan Walikota (PERWAL) Nomor 34 Tahun 2015 tentang DPWK.

Program DPWKEL sudah memiliki dasar hukum dan teknis yang kuat, baik melalui Perwali No. 7 Tahun 2021, SK Camat, maupun Juknis yang mudah dipahami oleh pelaksana teknis seperti pengurus RT/RW dan Pokmas. Bahkan, pelaksanaan program diperkuat dengan kegiatan sosialisasi hingga empat kali. Namun, yang menjadi temuan baru pada penelitian ini adalah masih adanya kesenjangan pemahaman pada tingkat masyarakat umum terhadap isi dan tujuan program, meskipun perangkat kebijakan dinilai sudah ideal secara teknis.

Kesenjangan ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan sudah dirancang dengan baik secara aturan dan hukum, tapi belum sepenuhnya memperhatikan cara masyarakat memahami kebijakan tersebut. Artinya, saat menjalankan kebijakan, tidak cukup hanya jelas dari segi aturan dan teknis, melainkan harus mempertimbangkan strategi komunikasi yang lebih inklusif untuk menjembatani pemahaman masyarakat awam.

Hal ini belum banyak dibahas dalam penelitian terdahulu, seperti dalam Siti Khaerunnisa, dkk (2023:646), yang lebih menekankan aspek alokasi anggaran dan legalitas program. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan perspektif baru bahwa kebijakan yang diidealkan bukan hanya harus sempurna dalam rancangan, tapi juga harus terbukti inklusif dalam pemahaman masyarakat sebagai penerima manfaat utama.

2. Target Group

Menurut Smith dalam Samudra, dkk (2023:54), kelompok sasaran (*target groups*) adalah mereka (orang-orang) yang paling langsung dipengaruhi oleh kebijakan dan yang harus mengadopsi pola-pola interaksi sebagaimana yang diharapkan oleh perumus kebijakan. Dalam konteks implementasi, kelompok sasaran tidak hanya menjadi penerima manfaat kebijakan, tetapi juga memiliki peran aktif dalam menentukan sejauh mana kebijakan tersebut dapat berjalan efektif di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan program Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan (DPWKEL) menunjukkan pendekatan partisipatif yang kuat, di mana masyarakat dilibatkan sejak tahap Musling hingga Musrenbangkel sesuai Perwali No. 33 Tahun 2015, dan peran aktif lembaga-lembaga lokal dalam perencanaan menunjukkan adanya kepedulian tinggi. Namun demikian, partisipasi pada tahap evaluasi masih terbatas untuk masyarakat. Dari sisi dampak, program ini terbukti memberikan manfaat nyata, baik secara umum seperti perbaikan sarana-prasarana seperti jalan dan drainase maupun individu seperti perbaikan rumah tidak layak huni dan jambanisasi, serta mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan akses ekonomi dan kesempatan kerja sementara.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Deri Firmansyah, dkk (2020:177) menunjukkan bahwa terlaksananya pembangunan desa secara fisik maupun non fisik di Kecamatan Cibitung Kabupaten Sukabumi tidak terlepas dari adanya dana desa yang dialokasikan secara, transparan, akuntabel, disiplin, dan tertib anggaran oleh para pengelola

aparatur desa serta adanya partisipatif masyarakat yang mendukung tercapainya program-program Pembangunan desa.

Jika dibandingkan dengan hasil penelitian Deri Firmansyah, dkk (2020:177) yang menekankan pentingnya alokasi dana desa yang transparan dan partisipasi masyarakat, penelitian ini menunjukkan bahwa sebelum partisipasi itu terbentuk, ada elemen penting berupa sosialisasi dari pemerintah sebagai penggerak awal. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa inisiatif pemerintah dalam menyampaikan informasi secara inklusif dan terbuka kepada masyarakat merupakan faktor penentu yang belum banyak disorot.

Dengan demikian, partisipasi masyarakat bukan hanya terjadi secara alami, tetapi didorong dan difasilitasi oleh pendekatan komunikatif pemerintah. Hal ini memberikan wawasan baru bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah dalam membangun dialog awal dengan kelompok sasaran melalui sosialisasi yang terstruktur dan adaptif.

3. *Implementing Organization*

Menurut Smith dalam Samudra, dkk (2023:55), organisasi pelaksana (*implementing organization*) adalah badan-badan pelaksana atau unit-unit birokrasi pemerintah yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan. Dalam penelitian tentang Program Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan (DPWKEL), pemahaman mengenai organisasi pelaksana sangat penting. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada bagaimana organisasi pelaksana, seperti BAPPEDA dan dinas terkait lainnya dalam melaksanakan tugas mereka. Efektivitas mereka dalam mengelola sumber daya, berkoordinasi, serta melibatkan partisipasi masyarakat akan sangat menentukan pencapaian tujuan program, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkelanjutan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas organisasi dalam implementasi program Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan (DPWKEL) dinilai memadai dengan keterlibatan masyarakat yang baik dan

representasi gender yang sesuai regulasi, meskipun ada penurunan partisipasi karena kendala teknis seperti pembatasan peserta, pelaporan Pokmas selalu dilakukan tepat waktu meskipun sempat terkendala defisit anggaran pada tahun 2024. Koordinasi antar implementor umumnya berjalan baik melalui forum-forum seperti Musrenbang, namun peran kecamatan dinilai belum maksimal sebagai penghubung utama, yang mengakibatkan ketidakseimbangan pelaksanaan antar wilayah kecamatan.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Siti Khaerunnisa, dkk (2023:646) menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia dalam kompetensi dan pengetahuan terutama dalam melakukan perencanaan program-program non infrastruktur masih sangat lemah sehingga fokus perencanaan dan penggunaan DPWK masih terbatas pada pembangunan infrastruktur.

Temuan baru dalam penelitian ini adalah belum maksimalnya peran kecamatan sebagai penghubung utama antara kelurahan, OPD, dan masyarakat. Hal ini berdampak pada ketidakseimbangan pelaksanaan antar wilayah kecamatan. Kecamatan, yang seharusnya menjadi fasilitator koordinasi lintas unit, justru menjadi titik lemah dalam rantai implementasi, menyebabkan pelaksanaan program berjalan tidak merata dan berpotensi menciptakan kesenjangan pembangunan antar wilayah.

Berbeda dengan penelitian terdahulu oleh Siti Khaerunnisa, dkk (2023:646), yang menyoroti lemahnya kapasitas SDM dalam perencanaan program non-infrastruktur, temuan ini mengungkap permasalahan struktural dalam koordinasi, khususnya pada level kecamatan. Hal ini memperluas pemahaman bahwa tantangan implementasi kebijakan bukan hanya terletak pada kualitas SDM teknis, tetapi juga pada efektivitas struktur organisasi dan kepemimpinan antar jenjang birokrasi.

Dengan demikian, optimalisasi peran kecamatan sebagai simpul koordinasi sangat krusial untuk menciptakan pelaksanaan program yang lebih merata, inklusif, dan berdampak luas. Hal ini menambah temuan

baru dalam kajian implementasi kebijakan, yaitu pentingnya memperkuat fungsi institusional pada level menengah guna menjembatani pelaksana teknis dan perumus kebijakan.

4. Environmental Factor

Menurut Smith dalam Samudra, dkk (2023:55), faktor lingkungan (*environmental factor*), adalah unsur-unsur dalam lingkungan yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh implementasi kebijakan, seperti aspek budaya, sosial, ekonomi dan politik. Dalam konteks implementasi Program Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan (DPWKEL) di Kelurahan Deringo, faktor-faktor seperti budaya gotong-royong masyarakat, kondisi ekonomi warga, serta dukungan politik dari pihak kelurahan turut menentukan keberhasilan program. Ketidaksesuaian antara kebijakan yang dirancang dengan kondisi lingkungan lokal dapat menyebabkan kebijakan tidak berjalan optimal atau bahkan gagal mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan (DPWKEL) sejalan dengan nilai-nilai budaya dan spiritual masyarakat setempat, bahkan didukung oleh tradisi seperti selamatan dan kegiatan keagamaan yang memperkuat partisipasi. Meskipun sempat ada penolakan di awal program oleh kelompok kecil karena alasan ideologis dan konflik lahan, pendekatan langsung berhasil membangun dukungan luas. Secara ekonomi, program ini memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pelatihan dan pekerjaan jangka pendek dalam proyek pembangunan. Sementara dari sisi politik, pelaksanaan DPWKEL relatif netral dan stabil tanpa kendala karena masyarakat mampu memisahkan preferensi politik dengan kebutuhan pembangunan, dan sistem pergantian kepengurusan Pokmas yang bergantian mampu meredam potensi konflik internal.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Arya Bagus Pramudyansyah dan Bahrudin Kurniawan (2023) menunjukkan bahwa di dalam pelaksanaan program P3TGAI di desa Jatidrojog, pemerintah desa

selaku pemangku kebijakan memperhatikan betul kondisi lingkungan eksternal maupun internal di dalam penyelenggaranya, selain itu faktor nilai, dan budaya masyarakat menjadi alasan dasar ketika suatu lingkungan kebijakan mempengaruhi suatu keputusan. Keputusan yang sudah dibuat harus diperhatikan lingkungan eksternal dan internal sehingga kebijakan ini mampu diterima oleh masyarakat banyak.

Temuan baru dalam penelitian ini adalah bagaimana faktor budaya dan spiritual masyarakat tidak hanya sebagai nilai pasif, tetapi menjadi penggerak utama partisipasi. Selain itu, sistem rotasi kepengurusan Pokmas yang dilakukan secara terstruktur ternyata menjadi kunci keberhasilan dalam meredam konflik internal. Berbeda dengan penelitian terdahulu oleh Arya Bagus Pramudyansyah dan Bahrudin Kurniawan (2023), yang menekankan pentingnya memperhatikan nilai dan budaya sebagai dasar penerimaan masyarakat terhadap kebijakan, temuan dalam penelitian ini memperluas pemahaman bahwa keberhasilan implementasi kebijakan juga ditentukan oleh kemampuan untuk memanfaatkan budaya lokal sebagai kekuatan penggerak, bukan sekadar latar belakang penerimaan.

Dengan demikian, penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan berbasis kearifan lokal dan pemahaman mendalam terhadap lingkungan masyarakat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam implementasi kebijakan pembangunan. Integrasi nilai budaya, dukungan ekonomi, serta stabilitas politik lokal menjadi faktor penting yang dapat memperkuat efektivitas program seperti DPWKEL dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa program DPWKEL ini telah berjalan dengan cukup efektif dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Dari aspek idealized policy, program memiliki pedoman teknis yang jelas dan relevan, meskipun masih terdapat kesenjangan pemahaman di kalangan

masyarakat umum. Aspek target groups menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif cukup kuat meski perlu peningkatan pada tahap evaluasi. Dalam aspek implementing organization, organisasi pelaksana memiliki kapasitas yang baik, namun tantangan teknis dan anggaran perlu diatasi agar partisipasi tetap optimal. Sedangkan pada aspek environmental factor, program mampu beradaptasi dengan nilai-nilai lokal dan menunjukkan netralitas politik yang positif. Secara keseluruhan, DPWKEL menjadi program yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta berpotensi terus berkembang jika disertai dengan penguatan kapasitas, partisipasi, dan koordinasi antar lembaga. Sebagai rekomendasi, Kelurahan Deringo perlu melakukan sosialisasi program Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan (DPWKEL) secara langsung kepada masyarakat umum, tidak hanya melalui RT/RW atau Pokmas setempat agar kesenjangan pemahaman mengenai nama, tujuan, dan mekanisme program dapat diminimalkan. Kelurahan Deringo perlu meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam tahap evaluasi, Hal ini dapat dilakukan melalui penyediaan media komunikasi seperti papan informasi atau forum diskusi daring untuk menampung masukan dan saran warga. Bappeda Kota Cilegon juga perlu melakukan pelatihan dan penguatan peran kecamatan sebagai fasilitator dan penghubung antar OPD, Kelurahan, dan masyarakat, agar bisa mengatasi peran kecamatan yang masih lemah dalam koordinasi program Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan (DPWKEL). Serta dukungan dari lembaga lokal seperti LPM, Karang Taruna, dan Kader Posyandu perlu difasilitasi secara berkelanjutan untuk menjamin keberlanjutan program DPWKEL, sehingga pelaksanaannya tidak bergantung hanya pada satu periode kepengurusan Pokmas.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2022). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (Edisi Revisi Ke-2). Alfabeta.
- Dewi, D. S. K. (2022). *Kebijakan Publik (Proses, Implementasi Dan Evaluasi)*. Penerbit Samudra Biru (Anggota IKAPI).

- Firmansyah, D., Suseptyo, D. P., & Sumira, M. (2020). Dampak Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Pada Desa Cibitung Kecamatan Sagaranen Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 3(2). <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JABI>
- Khaerunissa, S., Hasanah, B., & Sururi, A. (2023). Kapasitas Inovasi Program Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan dalam Mendukung Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Daerah. *Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2). <https://doi.org/10.14710/dialogue.v5i2.20348>
- M.D. Assa, C., Lapian, M., & Singkoh, F. (2020). Efektivitas Penggunaan Dana Kelurahan Dalam Pembangunan Sarana Dan Prasarana Di Kelurahan Sendangan Kecamatan Kawangkan Kabupaten Minahasa. *Eksekutif: Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 2(5).
- Nur Aisah, R., Supriyo Wibowo, A., Astuti, A., & Suherman. (2020). Kemiskinan Dan Faktor Penyebabnya Di Kelurahan Deringo Kecamatan Citangkil Kota Cilegon. *Jurnal Agribisnis Terpadu*, 13(2), 315–328.
- Pramudyansyah, A. B., & Kurniawan, B. (2023). *Implementasi Kebijakan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Jatidrojog Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan* (Vol. 11).
- Saleh, S. (2017). *Analisis Data Kualitatif*. Pustaka Ramadhan.
- Samudra, A. A., Andriansyah, Suradika, A., & Kadarisman, M. (2023). *Implementasi Kebijakan Publik & Evidence-Based Policy*. Penerbit Samudra Biru (Anggota IKAPI).
- Tadanugi, I. N. (2019). Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Sarana Dan Prasarana Di Desa Bo'e Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso. *Jurnal Ilmiah Administratie*, 12(1).